

PENERAPAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KOTA DUMAI TAHUN 2019

Oleh : Chairul Vinsensius

e-mail : chairulvinsensius39@gmail.com

Pembimbing : Dr.Tito Handoko,S.IP.,M.Si

e-mail : tito.handoko@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Clean water is an important element in human daily life. The fulfillment of clean water is one of indicator of the level of quality of life humans in an area. The problem of this research is inability PDAM Dumai City in providing clean water services in Dumai City as a service providers that are given the authority of the Dumai City Government to solve the problem of clean water in Dumai City. One of the efforts to overcome the problem of clean water in Dumai City by means public private partnership.

This study aims to determine the process of implementing public private partnership to overcome the problem of providing clean water in Dumai City, the impact of public private partnership in improving clean water services and factors what are the obstacles to public private partnership (PPP) in providing clean water in Dumai City in 2019. Approach this research that used is a qualitative approach and this type of research is descriptive. The location of this research was carried out at the Tirta Bersemai Regional Drinking Water Company Dumai City, Dumai City Public Works amd Spatial Planning Service, and PT. Dumai Tirta Persada. Data collection techniques were carried out by interview and documentation.

The results of this study in the application of public private partnership in the provision of clean water in Dumai City has been going quite well, it can be seen from service coverage, quality, quantity and continuity of cleawn water enhancement. The construction of clean water supply system in Dumai city has become a consideration for PDAM Dumai City because of ots inability to provide clean water service in Dumai City. And become an inhibiting factor in implementation of public private partnership in the provision of clean water in the City of Dumai is that it takes a long ti,e in terms of obtaining a building permit buildings and from the quality of raw water which is very difficukt to treat.

Keywords : Service, Public Private Partnership, PDAM.

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 5 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal untuk kebutuhan sehari-hari. Namun penyediaan air bersih di Indonesia masih dihapakan permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini masalah air belum dapat diatasi sepenuhnya. Seperti yang terjadi pada Kota Dumai masalah air bersih sampai saat ini belum dapat teratasi sepenuhnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai No 09 Tahun 2007 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM Tirta Bersemai Kota Dumai menjadi fasilitas pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Dumai. Cakupan pelayanan air bersih yang diberikan PDAM Kota Dumai masih tergolong rendah dari sekitar 310.444 jiwa masyarakat Kota Dumai yang mampu terlayani hanya sekitar 4% dengan unit Produksi yang beroperasi dengan kapasitas 20 l/d. PDAM Kota Dumai memanfaatkan sumber air tang berasal dari sungai mesjid dengan kapasitas aliran saat musim hujan 2 m³ per detik dan sedangkan musim kemarau 470 l/d/ Kualitas air baku merupakan air gambut yang memiliki kandungan warna sekitar 16,5 Pt-Co (batas yang diijinkan %) Pt-Co), pH hanya 4 (6,5-9,0), angkat oemangat 94,5 mg/lit KMNO₄ (10mg/lit KMNO₄).

Menurut Joko Pelayanan air bersih yang baik yaitu : (1). Menyediakan air yang kualitas aman dan sehat, (2). Menyediakan air yang memadai kuantitas, (3). Menyediakan air secara kontinyu, dan harga terjangkau, (4). Mencakup seluruh wilayahnya, dan (5). Alirannya mengalir 24 jam (Yuliani,Y & Rahdiwawan,M, 2015). Namun Kenyataan yang ada, pelayanan air

bersih di Kota Dumai yang diberikan PDAM Tirta Bersemai belum sepenuhnya dapat memuaskan pelanggan dan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Dumai dan aliran air PDAM hanya berjalan sekitar 3-5 jam sehari saja.

Tabel 1

Laporan Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Bersemai Kota Dumai Tahun 2019

No	Kecamatan Wilayah Pelayanan	Rumah Tangga	Sosial	Mobil Tangki	Jumlah
1	Dumai Timur	142	43	1	186
2	Dumai Kota	93	76	-	169
3	Dumai Selatan	35	11	-	46

Sumber : PDAM Kota Dumai

Dari 7 Kecamatan yang ada di Kota Dumai baru 3 Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dari PDAM Tirta Bersemai, PDAM belum mampu melayani seluruh wilayah kota Dumai.

Tabel 2

Jumlah Perkembangan Pelanggan PDAM Kota Dumai Tahun 2015-2019

No	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	1718	1389	803	888	444

Sumber : PDAM Kota Dumai

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah pelanggan PDAM mengalami penurunan, salah satu penyebabnya masih banyaknya pipa pendistribusian yang sudah rusak dengan tingkat kebocoran pipa pendistribusian sekitar 40%.

Selama ini penyediaan air bersih di Kota Dumai dimonopoli oleh pemerintah. Pemerintah Kota Dumai perlu melakukan upaya dalam meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Dumai. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota

Dumai untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih di Kota Dumai menjadikan sebuah kebutuhan untuk melibatkan pihak swasta untuk bekerjasama membangun sarana dan prasarana penyediaan air bersih sebagai bentuk nyata Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan pelayanan air bersih. Menurut Suryokusomo bahwa peningkatan penyediaan air bersih membutuhkan kebijakan dengan aspek kelembagaan, peraturan, peningkatan akses dan juga pengembangan partisipasi masyarakat dan swasta (Suryokusomo, 2008).

Untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih di Kota Dumai, Direktur PDAM kota Dumai di tunjuk sebagai penanggung jawab Kerjasama dengan badan usaha atau swasta yang berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 434/DPUPR/2018. Menurut Bambang Istianto Public Private Partnership adalah perjanjian Kontrak antara pemerintah dengan sektor swasta dalam jangka waktu tertentu (Istianto, 2011).

Dengan ada kerjasama PDAM dan Pihak Swasta (PT. Dumai Tirta Persada) Pemerintah Kota Dumai mengharapkan dapat membangun kapasitas SPAM dengan kapasitas 450 l/d sehingga dapat memenuhi pelayanan air minum sebesar 35% dari jumlah penduduk Kota Dumai dan juga dapat mengurangi tingkat kebocoran (PUNet, 2019). Saat ini proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha, mulai beroperasi dan mengalirkan air bersih kepada masyarakat. saat ini SPAM di Kota Dumai tahap IA sudah dialirkan ke permukiman warga dengan kapasitas 50 l/d, kemudian secara bertahap akan akan ditambahkan sebanyak 250 l/d sampai 450 l/d sampai 35 % dari jumlah penduduk Kota Dumai (Gunawan, 2020).

Dengan adanya keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur telah terbukti banyak membantu pemerintah

terutama dalam penyediaan infrastruktur di negara-negara berkembang maupun negara maju, diharapkan dengan adanya kemitraan antara pemerintah-swasta di Kota Dumai diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih di Kota Dumai.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta dalam mengatasi masalah penyediaan air bersih di Kota Dumai Tahun 2019?
2. Bagaimana dampak kerjasama pemerintah swasta dalam peningkatan pelayanan air bersih di Kota Dumai tahun 2019?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan air bersih di Kota Dumai Tahun 2019?

C. KERANGKA TEORI

1. Public Private Partnership

1.1 Pengertian *Public Private Partnership*

Public Private Partnership merupakan bentuk upaya pemerintah untuk berkerjasama dengan pihak swasta. Public private partnership merupakan bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah maupun swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset yang dimiliki kedua pihak bekerjasama untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat (Putra, 2016).

Terminologi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia dimulai sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang telah berapa kali diubah yaitu PP Nomo 13 Tahun 2010 dan perubahan terakhir adalah

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Jenis infrastruktur yang dapat kerjasama antara pemerintah dan swasta meliputi transportasi, jalan, telekomunikasi dan penyediaan air minum.

Proyek penyediaan air bersih mencakup dalam pembangunan sarana pengambilan air baku, jaringan transmisi dan distribusi serta instalasi pengolahan. Pembangunan infrastruktur air bersih di Indonesia memiliki karakter sebagai proyek dengan kebutuhan investasi yang besar. Beberapa telah berhasil mengimplementasi PPP pada sektor air minum seperti keberhasilan Romania yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan tarif yang kompetitif serta menekan resiko kehilangan air bersih dan Kanada yang melakukan terobosan non konvensional dalam melaksanakan PPP air minum, Pemerintah menerapkan standar kualifikasi yang ketat dalam implementasi PPP layaknya kompetisi (Rifai, 2014).

Tujuan utama pelaksanaan PP untuk mengatasi masalah pembiayaan proyek infrastruktur, meningkatkan pelayanan dan juga peningkatan skill SDM untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

1.2. Prinsip *Public Private Partnership*

Menurut Susanto dan Berawi *Public Private Partnership* memiliki faktor keberhasilan yaitu :

- a. Kepercayaan dan kesetaraan antar para pihak
- b. Komunikasi yang baik dan bekerjasama yang solid antar para pihak
- c. Komunikasi dan dukungan yang kuat dari para pengambil keputusan
- d. Pembagian resiko yang berimbang

- e. Seleksi para pihak berdasarkan kinerja dan keahlian

1.3. Bentuk *Public Private Partnership*

- a. Kontrak layanan (*service contract*) merupakan beberapa kontrak pelayanan infrastruktur saat ini telah banyak dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta
- b. *Build Operator Lease Transfer* (BOLT), yaitu pemerintah menyeragkan aset berupa tanah atau lahan kepada pihak swasta untuk dibangun, dikelola selama waktu tertentu dan kemudian menyerahkan kembali kepada pemerintah setelah habis masa kontrak.
- c. *Build Own Operate* (BOO), yaitu memberikan konsesi, investor punya hak mendapatkan pengembalian investasi, keuntungan yang wajar sehingga investor dapat menarik biaya dengan persetujuan pemerintah dari pemakai jasa infrastruktur yang dibangunnya.
- d. *Build Operate Transfer* (BOT), Pihak swasta diberikan kewenangan untuk membangun, mengoperasikan, dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan setelah masa operasionalnya berakhir maka fasilitas tersebut diserahkan kepada pemerintah.

1.4. Tahapan Pelaksanaan *Public Private Partnership*

Menurut Bambang Istianto, Proses pelaksanaan *Public Private Partnership* ada 5 (lima) tahap yaitu (Istianto, 2011):

1. Tahap Perencanaan
Tahap ini Pemerintah Daerah menyiapkan rencana proyek yang sesuai dengan kriteria RPJM nasional/daerah
2. Tahap Penyiapan Proyek

Tahap ini menyiapkan studi kelayakan dan hal-hal yang menunjang pelaksanaan proyek

3. Tahap Pengadaan

Tahap ini proses pengadaan tender yaitu dari memilih mitra kerjasama, bentuk kerjasama dan pembuatan kontrak

4. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan pada saat ditanda tangani perjanjian sampai berakhirnya kerjasama seperti pendirian badan usaha, perolehan dana, kontruksi, operasi dan pemeliharaan

5. Tahap Pengawasan

Tahap ini untuk memastikan operasi proyek sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan hasil pelaksanaan.

2. Pelayanan

2.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Moenir pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan kepentingan orang lain (Moenir, 2014).

Menurut Moenir ada dua faktor yang mempengaruhi pelayanan faktor penghambat dan faktor pendukung pelayanan:

1. Faktor penghambat :

- Kurangnya kesadaran terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab
- Sistem, prosedur, metode yang tidak memadai sehingga mekanisme tidak berjalan sebagaimana mestinya
- Kemampuan pegawai yang tidak memadai
- Tidak tersedia sarana pelayanan yang memadai

2. Faktor Pendukung antara lain

- Faktor kesadaran para pejabat atau pegawai yang berkesinambungan dalam pelayanan
- Faktor aturan yang memadai
- Faktor keterampilan pegawai
- Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas layanan

D. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok (Djunaidi, 2014).

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai dengan objek penelitian PDAM Kota Dumai, Dinas PUPR dan PT. Dumai Tirta Persada. Lokasi ini dipilih guna menggambarkan bagaimana penerapan kerjasama pemerintah dalam penyediaan air bersih, dampak dari kerjasama dan faktor penghambat kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan air bersih di Kota Dumai. Data diperoleh dengan melakukan wawancara bersama informan yaitu Direktur PDAM, Kepala Bagian Umum PDAM, Kepala Produksi PDAM Kota Dumai, Pra Manager PT. Dumai Tirta Persada, Kasi Pelaksanaan PLP dan Air Minum Cipta Karya Dinas PUPR.

E. PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Dumai

Menurut Walker et al menyebutkan ada 3 (tiga) alasan penerapan skema KPBU yaitu : (1). Pihak swasta memiliki mobilitas yang lebih baik dibandingkan pemerintah,

(2). Pihak swasta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, (3). Pemerintah dinilai kurang mampu menangani pendanaan untuk proyek infrastruktur berskala besar (Cheung, 2009).

Adapun alasan *public private partnership* dalam pembangunan infrastruktur penyediaan di Kota Dumai, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agus Adnan Selaku Direktur PDAM Kota Dumai yaitu :

“Salah satu alasan kerjasama ini dilakkan karena keterbatasan anggaran APBD Kota Untuk membangun infrastruktur air bersih yang lebih baik”(wawancara 25 Febuari 2021).

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Indra Gunawan Siregar Kasi

Pelaksanaan PLP Air Minum Dinas PUPR Kota Dumai yaitu :

“Keterbatasan anggaran APBD Kota Dumai untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih, pemerintah berinsiatif pencari pendanaan dari pihak swasta”(Wawancara 8 Maret 2021).

Keterbatasan anggaran APBD Pemerintah Kota Dumai, pemerintah berinsiatif mencari pendanaan dari pihak swasta agar dapat membangun dan meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Dumai. agar kerjasama ini berjalan dengan lancar aktor yang terlibat memiliki peran masing- masing sebagai berikut :

Tabel 3

Peran Aktor Yang Terlibat Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Dumai

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Dumai	Pemerintah	Swasta
Sebagai pendistribusi air bersih kemasyarakat Kota Dumai dan Penanggung jawab kerjasama	- Sebagai inisiator dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta - Membantu dalam mengurus surat izin dan penyediaan lahan	- Sebagai pendana untuk membangun infrastuktur air bersih di Kota Dumai - Sebagai pembangun, desain dan sekaligus kontuksi - Dan sebagai penanggung jawab operasi, pengelola dan pemeliharaan infrastruktur

Sumber :olahan penulis

Dalam perjanjian kerjasama proyek pembangunan penyediaan air bersih di Kota Dumai, pihak swasta bertanggung jawab atas pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan proyek. Perjanjian kerjasama skema *public private partnership* lazimnya

memiliki jangka waktu yang relatif panjang lebih panjang (lebih dari 15 tahun), proses public private partnership lebih panjang dan kompleks karena mengacu pada prinsip kehati-hatian agar mengurangi dampak dan resiko yang merugikan pemerintah dan

perjanjian PPP memiliki nilai kontrak yang lebih besar (Suhendra, 2017).

Proses Pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam penyediaan air bersih di Kota Dumai sebagai berikut :

1.1 Tahap Perencanaan

Tahap terciptanya hubungan kerjasama dengan sistem *public private partnership* (PPP) dalam proses pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih 450 l/d di Kota Dumai dimulai dengan adanya proses perencanaan. Perencanaan pembangunan air bersih telah dirumuskan dalam visi misi Kota Dumai tahun 2016-2021 sebagaimana wawancara bersama Bapak Amir Syahrudin selaku Kepala Bagian Umum PDAM Kota Dumai sebagai berikut :

“sebagaimana misi Kota Dumai tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Dumai dan ketidakmampuan PDAM memberikan pelayanan air bersih, Kota Dumai berkomitmen untuk membangun penyediaan air bersih di Kota Dumai agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik”.(wawancara 23 Febuari 2021).

Sedangkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Indra Gunawan selaku Kasi Pelaksanaan PLP Air Minum Bagian Cipta Karya Dinas PUPR dasar perencanaan kerjasama pemerintah dengan swasta sebagai berikut :

“Karena ketidakmampuan PDAM memberikan pelayanan air bersih dan keterbatasannya anggaran APBD yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai berinovasi untuk mencari dukungan pendanaan dari pihak swasta untuk meningkatkan sistem

penyediaan air bersih di Kota Dumai.”(wawancara 8 Maret 2021).

Ketidakmampuan PDAM dan Keterbatasan anggaran APBD yang dimiliki Kota Dumai untuk membangun infrastruktur air bersih di Kota Dumai sebagai dasar perencanaan untuk mencari dukungan pendanaan dari pihak swasta.

1.2 Tahap Persiapan Proyek

Dalam persiapan pembangunan pembangunan penyediaan air bersih yang berkapasitas 450 l/d aktor-aktor yang terlibat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Agus Adnan selaku direktur PDAM Kota Dumai hal-hal yang perlu disiapkan sebagai berikut :

“sebelum akhirnya melakukan kerjasama, pihak PDAM memberikan informasi tentang kondisi PDAM dan membuat laporan tentang kualitas dan potensi air baku, tujuan proyek dan sasaran proyek dan jaminan dan asuransi pelaksanaan yang akan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama”. (wawancara 25 Febuari 2021).

Sedangkan hal yang disiapkan pihak swasta yaitu PT. Dumai Tirta Persada sebelum melakukan kerjasama, sebagaimana wawancara dengan Bapak Zaka Rulizar selaku Pra Manager PT. Dumai Tirta Persada sebagai berikut :

“sebelum melakukan kerjasama, kami membuat terlebih dahulu studi kelayakan tentang kondisi Kota Dumai dan membuat proposal yang akan kami ajukan ke PDAM Kota Dumai”.(Wawancara 25 Febuari 2021).

Pemerintah sebagai inisiator kerjasama juga menyiapkan hal yang diperlukan agar kerjasama antara PDAM dan Swasta dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sebagai mana wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku Kasi Pelaksanaan PLP dan Air Minum bagian cipta karya sebagai berikut :

“Untuk mendukung keberhasilan kerjasama antara PDAM dengan Swasta, pemerintah membantu dalam menyiapkan surat izin penggunaan lahan, dan menarik bangsa pasar agar menggunakan air bersih”. (Wawancara 8 Maret 2021).

Agar kerjasama berjalan dengan lancar PDAM memberikan informasi tentang Kondisi Kota Dumai dan jaminan dan asuransi pelaksanaan, pihak swasta menyiapkan studi kelayakan dan menyiapkan proposal yang akan diajukan ke Pihak PDAM dan untuk mendukung keberhasilan kerjasama PDAM dengan Swasta (PT. Dumai Tirta Persada) Pemerintah membantu dalam mengurus surat izin pgunan lahan dan mendirikan bangunan.

1.3 Pengadaan

Dalam tahap mencari mitra, PDAM Kota Dumai melakukan proses lelang atau tender. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Bapak Agus Adnan selaku Direktur PDAM Kota Dumai sebagai berikut :

“Proses pencarian mitra kerjasama dilakukan dengan menggunakan sistem pelelangan proyek. Pihak PDAM memberikan informasi tentang pembangunan penyediaan air bersih dan mencari mitra yang cocok dan mampu memberikan harga yang paling rendah untuk memenuhi kebutuhan air bersih di

Kota Dumai”. (Wawancara 25 Febuari 2021).

Pihak PDAM menyebarkan informasi mengenai pencarian mitra kerjasama, pihak swasta tertarik untuk ikut kegiatan tender. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zaka Rulizar selaku Pra Manager PT. Dumai Tirta Persada Kota Dumai sebagai berikut :

“Pihak PDAM menyebarkan informasi mengenai kerjasama ini dan pihak kami merasa mampu untuk melayani kebutuhan tersebut lalu kami mengikuti kegiatan tender tersebut”. (Wawancara 25 Febuari 2021).

Tahapan lelang yang di lakukan oleh PDAM dengan tujuan agar mendapatkan rekan kerjasama yang sesuai untuk membangun infrastuktur penyediaan air bersih di Kota Dumai. Dalam pemilihan investor juga melewati beberapa tahapan, sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Bapak Amir Syahfrudin selaku Kepala Bagian Umu PDAM Kota Dumai sebagai berikut :

“Pemilihan investor dilakukan melalui proses beauty contest yaitu pihak investor menyampaikan minat mereka untuk melakukan investasi. Di mana calon investor yang menawarkan desain dan penawaran yang terbaiklah dialah yang menjadi pemenangnya”. (wawancara 23 Febuari 2021).

Setelah terpilihnya pemenang tender yaitu KSO PT.Adhi Karya dengan PT. Adaro Tirta Mandiri dengan membentuk PT. Dumai Tirta persada maka tahapan selanjutnya proses penandatngani perjanjian kerjasama pada tanggal 15 April 2019. Dalam pendatngani perjanjian kerjasama juga ditentukan model kerjasama,

model kerjasama sistem penyediaan air bersih di Kota Dumai yaitu bentuk *Build Operat Transfer (BOT)* dengan perjanjian kerjasama selama 25 tahun . Bentuk model kerjasama BOT dianggap paling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana wawancara bersama Bapak Zaka Rulizar selaku Pra Manager PT. Dumai Tirta Persada mengatakan bahwa :

“Bentuk kerjasama antara PDAM dengan PT. Dumai Tirta Persada adalah Build Operat Transfer (BOT). bentuk kerjasama ini dianggap paling menguntungkan kedua belah pihal, PDAM mempunyai lahan kami mempunyai modal untuk membangun sistem penyediaan air bersih tersebut, setelah kontra selesai seluruh aset akan diserahkan kembali ke pihak PDAM”.(Wawancara 25 Febuari 2021).

1.4 Tahap Pelaksanaan Proyek

Tahapan pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air bersih dengan kapasitas 450 l/d di Kota Dumai dilakukan ada tiga tahap yaitu tahap IA (tahap percepatan) dengan kapasitas 50 l/d, tahap IB dengan kapasitas 200 l/d dan Tahap II dengan Kapasitas 200 l/d. sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Bapak Agus Adnan selaku Direktur PDAM Kota Dumai sebagai berikut :

“Kerjasama pembangunan sistem penyediaan air bersih berkapistas 450 l/d dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap IA dengan kapasitas 50 l/d, tahap IB dengan kapasitas pembangunan 200 l/d dan tahap II dengan tahap II dengan kapasitas 200 l/d”.(Wawancara 25 Febuari 2021).

Hal ini juga disampaikan Bapak Zaka Rulizar Pra Manager PT. Dumai Tirta

Persada pembangunan sistem penyediaan air bersih melalui 3 tahap sebagai berikut :

“Kerjasama pembangunan ini dilakukan melalui 3 tahap, tahap IA atau tahap percepatan dengan kapasitas 50 l/d sudah mulai beroperasi pada tanggal 28 oktober dan sudah mengalirkan air bersih ke masyarakat Kota Dumai”. (wawancara 25 febuari 2021).

Mekanisme Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Berkapasitas 450 l/d :

a. Tahap IA atau Tahap Percepatan dengan Kapasitas 50 l/d

Wilayah pelayanan pada tahap percepatan ini meliputi Kelurahan Bintan, Laksamana, Rimba sekampung dan sukajadi yang berada di Kecamatan Dumai Kota, dan target sambungan rumbah mencapai 2.300 unit atau 37% dari jumlah wilayah pelayanan.

b. Tahap IB dengan kapasitas 200 l/d

Pada tahap ini wialayah pelayanan diperluas menjadi 3 Kecamtan yaitu Kecamatan Dumai Kota, Selatan dan Dumai timur dengan target wilayah pelayanan berjumlah 13.000 unit.

c. Tahap II dengan Kapsitas 200 l/d

Pada tahap pembangunan ini wilayah pelayanan diperluas ke Dumai Timur sehingga total menjadi 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan dan wilayah pelayanan berjumlah 38.514 unit dengan penambahan 5.000 unti dan jumlah pelanggan mencapai 52% dari jumlah rumah di wialayah pelayanan.

1.5 Tahap Pengawasan

Pengawasan hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa operasi proyek sesuai

dan memastikan perjanjian kerja sesuai dengan hasil pelaksanaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan PDAM Kota Dumai terhadap pelaksanaan kerjasama ini hanya sebatas kualitas air yang dihasilkan PT. Dumai Tirta Persada. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Agus Adnan selaku Direktur PDAM Kota Dumai sebagai berikut :

“Pihak Kami tidak mengawasi proyek secara tajam, PDAM hanya mengawasi dari kualitas air yang dihasilkan pihak PT. Dumai Tirta Persada yang harus sesuai dengan permenkes”.(wawancara 25 Februari 2021).

Sedangkan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam Kerjasama antara PDAM dengan pihak swasta, sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Bapak Indra Gunawan selaku Kasi Pelaksanaan PLP dan Air Minum Dinas PUPR sebagai berikut :

“Pihak Cipta Karya membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengawasi proses kerjasama ini, tiap bulan kami melakukan rapat maupun turun kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan sistem penyediaan air bersih ini”.(wawancara 8 maret 2021).

Pengawasan yang dilakukan pihak PDAM dalam kerjasama ini hanya sebatas mengawasi kualitas air yang dihasilkan dan pihak pemerintah melakukan monitoring untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerjasama.

2. Dampak Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Kota Dumai.

2.1 Pengolahan air baku

Sistem pengolahan air baku yang dipakai oleh PDAM Kota Dumai masih konvensional sedangkan pihak swasta (PT. Dumai Tirta Persada) diolah dengan pengolahan Pada Teknologi.

2.2 Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air Bersih

a. Kualitas air bersih

Kualitas air yang dialirkan cukup baik, air yang dialirkan sudah tidak keruh dan tidak berwarna lagi.

b. Kuantitas Air Bersih

Dengan adanya kerjasama ini, kuantitas produksi air baku mengalami peningkatan dari 20 l/d menjadi 70 l/d.

c. Kontinuitas Air Bersih

Kontinuitas air bersih yang didistribusikan ke masyarakat Kota Dumai 3-5 perhari dengan adanya kerjasama ini ada beberapa wilayah yang mengalir 24 jam.

2.3 Peningkatan Cakupan Pelayanan

Jumlah Pelanggan PDAM Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 404 sambungan rumah tangga setelah adanya proyek kerjasama beroperasi tahun 2020 jumlah pelanggan sebanyak 1.275 rumah tangga.

2.4 Tingkat Kebocoran

Tingkat kebocoran mengalami penurunan dari sekitar 70% menjadi 50%.

2.5 Penyesuaian Tarif Air Bersih

Untuk 10 Kubik Pertama tarif air bersih pertama di Kota Dumai sekitar Rp. 8.000 dan untuk perkubik selanjutnya Rp.10.000 diharapkan dengan ada kerjasama dapat menekan tarif air bersih menjadi Rp. 5.530 perkubik

2.6 Penanganan Keluhan Pelanggan

Penanganan Keluhan pelanggan dilakukan dengan membuat grup WA perwilayah pelayanan, jika terjadi kebocoran pelanggan dapat melaporkan melalui grup tersebut.

3. Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Dumai

Setiap kerjasama pasti terdapat kendala atau hambata baik dari proses perencanaan sampai tahap pelaksanaannya. Faktor penghambat kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan air bersih di Kota Dumai yaitu :

1. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses perizinan dalam mendirikan bangunan, menggali lahan dan hal lainnya.
2. Sumber air baku yang berasal dari sungai mesjid sulit untuk diolah
3. Kekurangan sumber air baku apalagi disaat musim kemarau
4. Fasilitas PDAM dalam penyediaan air bersih di Kota Dumai seperti pipa distrubusi, pompa sudah banyak tua dan rusak.
5. Instansi Pengolahan air pada PDAM yang tidak sesuai dengan standar.
6. Keterbatasannya anggaran untuk mengatasi segala kerusakan atau kebocoran pipa untuk mengganti pipa yang lama menjadi yang baru.

F. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Ketidakmampuan PDAM Kota Dumai dalam memberikan pelayanan air bersih di Kota Dumai dan terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Dumai untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih di Kota Dumai, untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota Dumai bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih di Kota Dumai, dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta terdapat peningkatan pelayanan yaitu pengolahan air baku, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih

dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Kota Dumai.

- b. Faktor penghambat Kerjasama Pemerintah Swasta (PDAM Kota Dumai dengan PT. Dumai Tirta Persada) antara lain: membutuhkan waktu yang lama dalam mengurus surat izin, sumber air baku yang sulit diolah, masih banyaknya fasilitas PDAM seperti PDAM seperti pipa pendistribusian, pompa sudah rusak dan tua dan Instalansi Pengolahan Air PDAM tidak sesuai standar dan terbatasnya anggran yang dimiliki.

2. Saran

- a. Untuk PDAM perlu memperbaiki jaringan pendistribusian, pompa dan instalansi pengolahan air yang lebih baik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai perlu peran aktif mengawasi pelaksanaan kerjsama agar dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari
- b. Untuk PT. Dumai Tirta Persada juga perlu berperan dalam membantu memasarkan bukan hanya mengolah sumber air baku dan pihak swasta perlu memberikan feedback lebih kepada masyarakat diluar kontek SPAM seperti memberikan sedikit keuntungan perusahaan untuk penanaman pohon disekitar mata air sebagai bentuk kepedulian swasta terhadap lingkungan.

REFERENSI

Buku

Djunaidi, G. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Istianto, B. (2011). *Privatisasi Dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana.

Moenir. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Savas. E.S. (2000). *Privatization and public partnership*. New York : CQ.Press

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suryokusumo, R. F. (2008). *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: UGM Press.

Jurnal

Cheung, E. C. (2009). Reasons for implementing public private partnership projects : perspectives from Hongkong, Australian and british practitioners. *Journal Of Property Investment and Finance*, 81-95.

Ismowati, M. (2016). Kajian Urgensi Public Private Partnership di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Administrasi* Volume VIII No.2

Putra, A. P. (2016). Model Public Private Partnership Pada pengelolaan sistem penyediaan air minum umbulan di Jawa timur Dalam konteks open Government. *Kebijakan Publik*.

Rifai, B. (2014). Implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 22, No. 2.

Suaibatul Aslamiyah, B.S. (2015). Model Partnership sebagai upaya strategis peningkatan pelayanan air bersih (studi terhadap public private partnership di Perusahaan Air Minum Kabupate Gresik). *Jurnal Administrasi Publik* Vol 2, No, 88-94

Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public Private Partnership) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 41-46.

Thamrin, H. (2017). Kajian Build Operate Transfer Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Volume 1 No. 2.

Yuliani, Y & Rahdiawan, M. (2015). Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Kelurahan Tugerejo Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota* Vol 3 No 1.

Berita Online

Gunawan, A. (2020, 11 02). *Bisnis.Com*. Retrieved 2 2, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201102/45/1312288/pt-dumai-tirta-persada-mulai-alirkan-air-bersih-ke-pelanggan>

PU-net. (2019, April 16). *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Retrieved Desember 16, 2020, from <https://www.pu.go.id/berita/view/16882/suplai-air-minum-bagi-100-ribu-penduduk-spam-kota-dumai-segera-dibangun>

